

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA RANAN
KECAMATAN ROPANG KABUPATEN SUMBAWA
DALAM PILGUB NTB TAHUN 2018**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Judul Skripsi : Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ranan
Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Dalam
Pilgub NTB Tahun 2018

Nama Mahasiswa : Sandra Wahutomo

Nomor Induk Mahasiswa : 21513A0077

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dinyatakan bahwa skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram untuk diajukan ke sidang skripsi.

Mataram, Agustus 2019

Menyetujui :

Pembimbing I



Drs. H. Darmansyah, M.Si.
NIDN. 0008075914

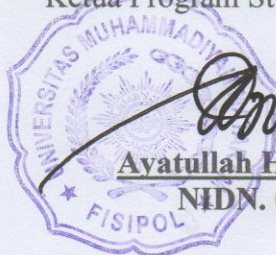
Pembimbing II



Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP.
NIDN.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA RANAN
KECAMATAN ROPANG KABUPATEN SUMBAWA
DALAM PILGUB NTB TAHUN 2018**

Disusun dan diajukan oleh :

SANDRA WAHUTOMO

NIM. 21513A0077

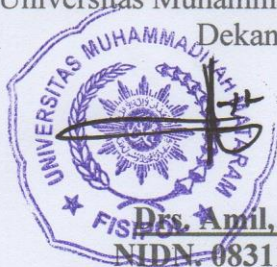
**PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal 10 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Tim penguji,

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** Ketua (.....)
(NIDN. 0008075914)
2. **Inka Nusamuda Pratama, S.IP.,M.IP.** Anggota I (.....)
(NIDN.)
3. **Drs. Amil, M.M** Anggota II (.....)
(NIDN. 0831126204)

Mengesahkan
Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126204

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandra Wahutomo
NIM : 21513A0077
Jenjang : S 1
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Mataram, 10 September 2019

Yang menyatakan



Sandra Wahutomo
(21513A0077)

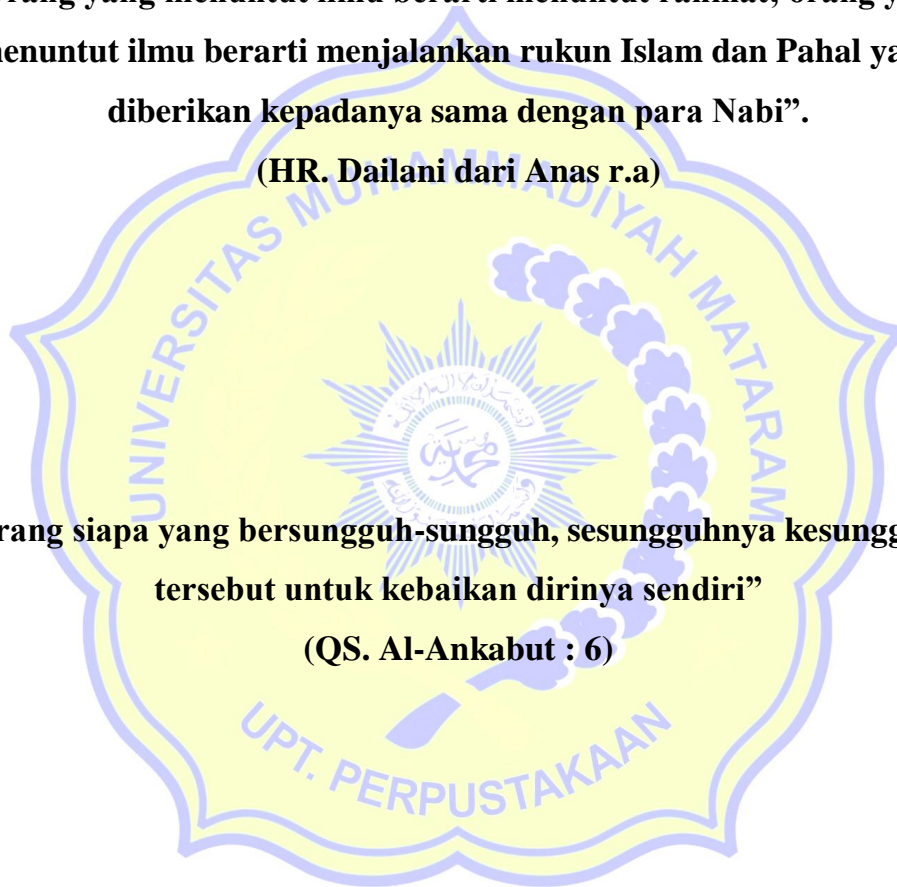
MOTTO

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(QS. Al-Ankabut : 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tercurah pada-Mu ya Rabb. Karena rahmat, hidayah dan inayah-Mu peneliti dapat mencurahkan inspirasi dalam skripsi ini. shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabu Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam yang akan senantiasa kita nantikan safaatnya di yaumul qiyamah.

Dalam menyelesaikan skripsi peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril, materil dan spiritual. Baik dalam bentuk bimbingan, arahan dan data-data yang berguna dalam penelitian skripsi ini. tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak dapat terselesaikan.

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

Bapak dan ibu tercita, yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan kasih sayang serta menjadi panutan yang baik untukku.

Untuk yang terkasih saudara dan saudariku.

Sahabat dan rekan-rekan seperjuanganku, ilmu Pemerintah 2015.

Serta Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat Hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA RANAN KECAMATAN ROPANG KABUPATEN SUMBAWA DALAM PILGUB NTB TAHUN 2018”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Manajemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. H. Junaidi, M.M. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si. selaku dosen Pembimbing Utama dan Bapak Inka Nusamuda Pratama, S.IP.,M.IP. selaku dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP. selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

5. Orang tua saya, saudara-saudara kami atas do'a, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
6. Keluarga besar Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya teman-teman seperjuangan kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
7. Seluruh civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amin.

Mataram, 10 September 2019

Penulis

Sandra Wahutomo
(21513A0077)

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA RANAN
KECAMATAN ROPANG KABUPATEN SUMBAWA
DALAM PILGUB NTB TAHUN 2018**

SANDRA WAHUTOMO

Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pada pemilihan yang diadakan secara langsung di Indonesia golput marak mewarnai penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah. Sedangkan untuk daerah NTB angka golput dari Pilkada tahun 2014 sebesar 11% meningkat menjadi 12% pada Pilgub 2018. Besarnya angka golput yang terus meningkat menunjukkan partisipasi politik yang terus menurun. Penelitian ini bertujuan antara lain untuk melihat tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Ranan dalam Pilgub NTB tahun 2018. Pada penelitian ini dikhususkan mengukur partisipasi pada bentuk konvensional. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap pasangan calon yang mereka pilih untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Ranan termasuk pemilih yang rasional atau tidak rasional dan juga mengetahui alasan pertimbangan masyarakat yang memutuskan untuk golput. Metode deskriptif dengan menggunakan survey sebagai metode utama penelitian ini ditambah dengan metode kualitatif menggunakan wawancara mendalam menjadikan hasil temuan lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan yang hanya menggunakan satu metode kuantitatif saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Ranan menunjukkan skala yang rendah, karena hasil survey menunjukkan 12% masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam Pilgub NTB 2018. Sementara itu bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan adalah memberikan suara untuk salah satu pasangan Cagub dan Cawagub. Pemilih yang memberikan suara pada salah satu pasangan Cagub dan Cawagub mayoritas adalah pemilih rasional. Sedangkan hasil pemberian suara menunjukkan angka golput sebesar 12%. Saran untuk yang akan datang diharapkan ada penelitian yang bermaksud menguji statistik untuk membuktikan kenyataan sebenarnya di lapangan. Selain itu direkomendasikan juga untuk penelitian selanjutnya tentang bagaimana pengaruh media massa terhadap partisipasi politik masyarakat dari latar belakang sosiokultural yang berbeda.

**POLITICAL PARTICIPATION OF THE UNITED STATES
THE SECURITY OF THE LABOR LAW
IN NTB PILGUB in 2018**

SANDRA WAHUTOMO

Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

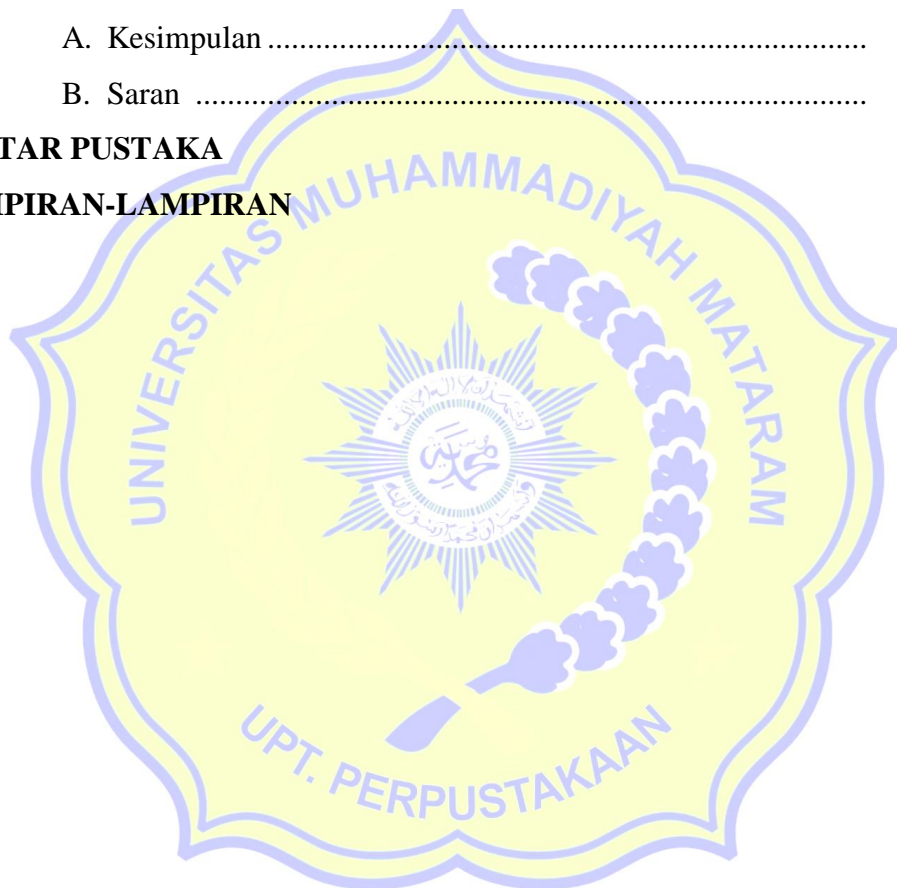
Elections held directly in Indonesia abstained in the coloring of the elections in various regions. As for the NTB region, abstentions from the 2014 elections by 11% increased to 12% in the 2018 governor elections. The large abstentions figures continued to show political participation continued to decline. This study aims, among other things, to look at the level of political participation in the village of Ranan in NTB's Pilgub in 2018. This study is specifically aimed at measuring participation in the conventional form. In addition, this study also aims to find out how the community's assessment of the candidate pairs they choose to find out whether the people of Ranan Village are rational or irrational voters and also know the reasons for the community's decision to abstain. Descriptive method using survey as the main method of this research coupled with qualitative methods using in-depth interviews makes the findings more clear and meaningful than those that only use one quantitative method. The results showed that the level of political participation in the village of Ranan showed a low scale, because the survey results showed that 12% of the people did not actively participate in the 2018 NTB Pilgub. Meanwhile, the most form of participation was voting for one of the Cagub and Cawagub pairs. Voters who voted for one of the majority pairs of Cagub and Cawagub were rational voters. While the results of the vote showed abstentions of 12%. Suggestions for the future are expected to have research that intends to test statistics to prove the real reality on the ground. It is also recommended for further research on how the influence of mass media on political participation of people from different sociocultural backgrounds

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	10
1. Model Partisipasi Politik.....	10
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Model Partisipasi ...	14
C. Penghambat dan Pendorong Partisipasi	18
a. Faktor Internal	18
b. Faktor Eksternal	19
c. Faktor Pendorong	19

D. Pemilihan Gubernur	20
a. Asas dan Sifat Pemilihan	20
b. Pemilihan	21
c. Pasca Pemilihan	22
E. Kerangka Pikir Penelitian	23
F. Definisi Konseptual	26
G. Definisi Operasional	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Jenis Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Penentuan Narasumber	32
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Luas dan Batas-Batas Wilayah Administrasi Desa Ranan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa.....	35
2. Keadaan Penduduk	35
3. Kondisi Geografis	36
4. Pendidikan	37
5. Mata Pencaharian	38
B. Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ranan	39
1. Karakteristik kepribadian Pemilih di Desa Ranan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa	39
2. Perilaku Pemilih.....	40
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Model Partisipasi Masyarakat Desa Ranan Pada Pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018.....	42
1. Sosial Ekonomi.....	42
2. Tingkat Pengetahuan Politik	47

D. Kendala dan Pendorong Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur di Desa Ranan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa	49
1. Faktor Internal	49
2. Faktor Eksternal	55
3. Faktor Pendorong	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Daftar Pemilih Tetap dengan yang Golput Desa Ranan	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2	Operasional Penelitian.....	27
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	35
Tabel 4.2	Jumlah Sarana Prasarana pendidikan di Desa Ranan.....	37
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Dan Jumlahnya di Desa Ranan.....	38
Tabel 4.4	Data Kemiskinan berdasarkan Dusun	39
Tabel 4.5	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 4.6	Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin dan Berdasarkan Dusun Desa Ranan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa.....	51
Tabel 4.7	Rekapitulasi hasil Perhitungan Berdasarkan Suara Sah dan Batal serta Suara Golput atau Tidak Digunakan Pada Pemilihan Gubernur di Desa Ranan	52
Tabel 4.8	Pekerjaan Masyarakat Desa Ranan	54
Tabel 4.9	Data mengenai Kemiskinan berdasarkan Dusun Di Desa Ranan.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.

24





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan merupakan sistem pemerintahan yang dianggap paling ideal saat ini. Keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara didalam negara demokrasi adalah hal yang sangat penting karena rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi (Gatara, 2009: 251).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Hal tersebut terbukti sejak seluruh masyarakat Indonesiamemilih Soekarno dan Hatta sebagai wakil yang di amanatkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden pertama. Rakyat bebas mengemukakan pendapat dan mengutarakan keinginannya demi terwujudnya masyarakat yang partisipatif (Sahdan, 2004:7).

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada. Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima)

tahun penyelenggaraan pemerintah Desa. Desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Salah satu persyaratan pembentukan Desa yaitu adanya pemerintah Desa, pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa Sentosa (Sembiring, 2009:87).

Selain dari pada itu Desa atau masyarakat Desa memiliki tugas setiap lima tahun sekali yaitu memilih kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah atau seringkali disebut dengan Pemilukada adalah Pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat (Sentosa Sembiring, 2009:87).

Pilkada secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai pilihan tepat untuk menuju proses demokratisasi, sesuai dengan salah satu tujuan reformasi yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Perbedaan dasar Pilkada langsung dengan tatanan politik perwakilan sebelumnya adalah tidak jelasnya statistik kehendak politik rakyat atas sosok kepala daerah yang akan memimpin (Sentosa Sembiring, 2009:1).

Dalam tatanan politik lama, keterwakilan masyarakat tidak dapat diukur persatu orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi dalam pemilihan langsung keterwakilan masyarakat secara statistik dapat diketahui secara konkret berdasarkan wilayah kecamatan, kelurahan dan Desa. Dengan lahirnya pemilihan

kepala daerah secara langsung merupakan satu langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia (Gatara, 2009: 253)

Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu kepala daerah langsung juga dapat dikatakan sebagai koreksi dari sistem pemilu kepala daerah yang terdahulu yang menggunakan mekanisme perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peralihan sistem perwakilan ke sistem pemilu kepala daerah langsung menyiratkan bahwa telah adanya sebuah kemajuan dalam sistem politik dan melibatkan rakyat untuk ikut serta dalam menentukan masa depan bangsanya sendiri dengan jujur dan adil (Gatara, 2009: 253)

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilu kepala daerah juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah Public policy (Sentosa Sembiring, 2009:86).

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 terdapat banyak Desa yang berpartisipasi salah satunya Desa Ranan

Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, Desa yang terletak di wilayah selatan Sumbawa ini adalah Desa yang terakhir di kecamatan Ropang atau Desa yang terakhir di wilayah selatan Sumbawa.

Desa Ranan merupakan salah satu dari 165 Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dalam hal pemilihan gubernur Desa Ranan telah melaksanakan pemilihan sebanyak 3 kali yang terakhir atau baru saja yaitu pada tahun 2018, Dalam proses pemilihan yang terjadi pada tahun 2018 tersebut tingkat partisipasi masyarakat tergolong rendah, melihat yang terjadi secara langsung atau dari jumlah pemilih dan yang tidak memilih (Golput).

Tabel 1.1.

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap dengan yang Golput Desa Ranan

Tahun	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Suara sah	Persentase
2008	529	516	97%
2013	545	530	97%
2018	567	549	96%

Sumber: Data diolah dari Kantor Desa Ranan Tahun 2018

Berdasarkan data di atas kita bisa melihat dalam 3 kali pemilihan Gubernur masyarakat yang tidak memilih atau golput pada Desa Ranan semakin meningkat, yang perlu kita ketahui juga masyarakat yang tidak memilih sebagian besar adalah mahasiswa yang kuliahnya diluar pulau Sumbawa. Bukannya tingkat partisipasi politik mahasiswanya kurang melainkan ada beberapa hal yang dilihat sebelum mereka pulang untuk memilih, selain dari mereka kuliahnya diluar pulau Sumbawa, biaya transportasi serta medan atau jalan yang harus ditempu dari Sumbawa menuju Desa Ranan tergolong masih jelek belum teraspal.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam bagaimana model partisipasi masyarakat Ranan dalam Pemilihan GubernurNTB.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi model partisipasi masyarakat pada Pemilihan GubernurNTB tahun 2018?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur NTB tahun 2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi model partisipasi masyarakat Desa Ranan dalam Pemilihan GubernurNTB tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan GubernurNTB tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bertujuan untuk mengembangkan konsep politik dalam pendidikan kewarganegaraan khusus model partisipasi politik dengan wilayah kajian pendidikan politik dalam kenegaraan.

b. Manfaat Praktis

1. Pemerintah

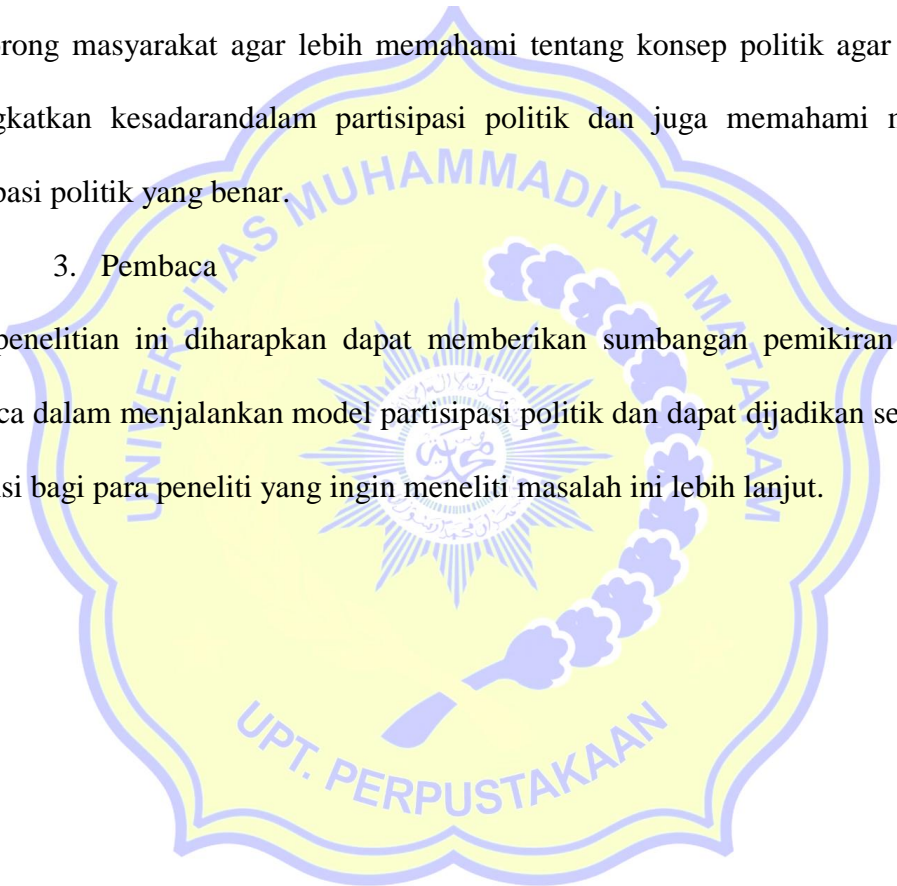
Bagi pemerintah, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur agar bisa lebih memahami tugas pokok dan fungsinya. Bagi pemerintah pusat dan juga daerah juga agar mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial politik.

2. Masyarakat

Mendorong masyarakat agar lebih memahami tentang konsep politik agar lebih meningkatkan kesadaran dalam partisipasi politik dan juga memahami model partisipasi politik yang benar.

3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pembaca dalam menjalankan model partisipasi politik dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang ingin meneliti masalah ini lebih lanjut.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu, jenis penelitian, metode penelitian dan temuan serta kesimpulan dari penelitian terdahulu dapat digunakan oleh peneliti sebagaibahan perbandingan. Dengan demikian dapat dengan mudah bagi peneliti untuk menemukan posisi penelitian tentang model partisipasi masyarakat pedesaan dalam Pemilihan GubernurNTB tahun 2018.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Kesimpulan
1	Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun 2015 (Study Di Kelurahan Kolongan Behar Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe)	Lidya Zakarias	Faktor-faktor penghambat partisipasi politik pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, di Kelurahan Kolongan Beha adalah tidak berada di tempat, faktor Administrtif, kurangnya kesadaran pemilih dan peran kandidat. Sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 adalah : Kesadaran Politik, Media massa dan pengaruh orang lain.

No	Judul	Peneliti	Kesimpulan
2	Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau putaran ke dua di kota pekan baru tahun 2018	Samsul Bahri	Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran ke dua yang lalu tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki rendah hal ini turun dibandingkan putaran pertama. Pada putaran kedua masyarakat yang ikut memilih hanya 34,61 %. Hal ini menggambarkan bahwa minat masyarakat dalam berpartisipasi mengalami penurunan.
3	Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum (study turn of voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)	Tia Subekti	Upaya meningkatkan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah Pemilu. Friedman dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat empat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat.
4	Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (Study Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa)	Sondakh Gideon Repi	Yang menjadi factor penghambat Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur tahun 2015 di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa terdiri dari beberapa factor diantaranya : Faktor Pemerintah terkait dengan keberadaan peraturan perundangan, factor penyelenggara baik KPUD maupun PANWASDA serta keberadaan dari partai politik yang menjadi peserta atau pengusung dari calon yang berkompetisi.

No	Judul	Peneliti	Kesimpulan
5	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo)	Atiek lestari/skripsi	Tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Purworejo tergolong masih rendah, karena hasil survey menunjukkan 61,2% responden kurang berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2008. Hal ini diperkuat hasil wawancara mendalam yang sebagian besar kurang berpartisipasi aktif dalam politik terutama dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2008.

Berdasarkan hasil penelitian tabel diatas, maka penulis mengemukakan hasil penelitian terdahulu. Penelitian pertama letak kekurangannya masi kurangnya data sehingga pembaca masi kurang paham, sedangkan hasil penelitiannya kurangnya kesadaran pemilih dan peran kandidat. Sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih adalah: Kesadaran politik, media massa dan pengaruh orang lain.

Penelitian kedua kekurangannya pada data yang sumbernya kurang jelas tapi terlihat lengkap, hasil peneliannya pemilihan pertama dan pemilihan kedua terdapat banyak sekali perbedaan dalam hal jumlah pemilih.

Penelitian ketiga kekurangannya tidak jelasnya hasil dari penelitian karena peneliti tidak menyimpulkan hasil penelitiannya sedangkan penelitian keempat dan kelimah hampir sama dengan penelitian pertama dan kedua yang letak kekurangannya pada data dan sumber data yang kurang jelas.

Pada penelitian model partisipasi Masyarakat pedesaan dalam pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018 kali ini peneliti akan lebih fokus pada data dan sumber data sehingga pembaca tidak ragu dalam melihat hasil penelitian, dan juga

penjelasan yang lebih rinci agar pembaca dapat dengan mudah memahami hasil penelitian. Peneliti saat ini juga tidak mengambil data pada internet tidak seperti peneliti terdahulu yang kebanyakan data diambil pada internet, peneliti akan langsung turun ke lapangan agar data jelas dan tidak diragukan kebenarannya.

B. Landasan Teori

1. Model Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti (2007 : 140) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warganegara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Kease dan Marsh (dalam Saiful Mujani, Liddle, dan Kuskrindho: 2012) membagi partisipasi politik menjadi dua, yaitu:

Pertama partisipasi konvensional (*convensional participation*). Partisipasi konvensional ini mencakup semua aktifitas warga negara biasa yang dilakukan untuk memengaruhi hasil akhir (*outcomes*) dari proses politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan baku, seperti pemungutan suara seorang calon untuk menduduki jabatan politik tertentu, atau kampanye menjelang pemilu.

Kedua, partisipasi tidak konvensional (*unconventional participation*). Partisipasi model ini adalah partisipasi politik dalam bentuk semua kegiatan yang dilakukan oleh warga negara untuk memengaruhi hasil akhir politik “yang tidak berhubungan dengan norma-norma hukum dan kebiasaan yang mengatur partisipasi politik dibawah suatu rezim tertentu”. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud contohnya adalah seperti demonstrasi, mogok kerja, atau perusakan fasilitas umum sebagai bentuk dari protes terhadap keputusan tertentu dari pemerintah.

Dusseldorp (1981) dalam Basrowi (2012:65) mengartikan partisipasi sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal. Definisi lebih rinci dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1979) dalam Basrowi, Sukidin, dan Suko Susilo (2012:65), partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program. Sementara itu, Davis (1977) dalam Basrowi, Sukidin, dan Suko Susilo (2012:65), memberikan definisi partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi tercapainya tujuan dan membagi tanggung jawab diantara mereka.

Dari uraian diatas, diperoleh pemahaman bahwa esensi dari partisipasi adalah keterliabatan (baik yang berkaitan dengan sikap maupun perbuatannyata) dalam kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, evaluasi, dan bahkan dalam memikul resiko dan tanggung jawab suatu program. Dari esensi

partisipasi dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang berupa frekuensi dari partisipasi masyarakat.

Cohen dan Uphoff (1979) dalam Basrowi (2012:66) membedakan empat jenis partisipasi, yaitu: pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi bila dilakukan bersama sama atau secara keseluruhan, maka akan memunculkan aktifitas yang terintegrasi secara potensial.

Menurut Milbrath dan Goel dalam Mufti (2007:154) dibagi menjadi 4 (empat) jenis partisipasi politik yaitu:

1. Apatist, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spectator, orang yang pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator, orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik.
4. Pengkritik, yaitu dalam bentuk partisipasi nonkonvensional bisa berupa pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi mogok, tindakan kekerasan terhadap harta benda (perusahaan, pengeboman, pembakaran).

Adapun menurut Surbakti dalam Mufti (2013:154) mengatakan bahwa partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Partisipasi politik aktif yang dimana partisipasi politik ini apabila kita merujuk pada Roth dan Wilson bisa diilustrasikan sebagai ketiga kelompok tadi (pengamat, partisipan, dan aktivis).

- b. Partisipasi politik pasif adalah orang-orang yang apolitik, atau dalam bahasa Ramlan Surbakti adalah kegiatan atau tindakan masyarakat yang menaati, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

Charles Andrian James dalam Anwar (2015:83) juga menglompokan partisipasi politik sebagai bagian dari partisipasi secara umum ke dalam tiga bentuk partisipasi, yaitu: 1. Partisipasi yang lebih pasif, 2. Partisipasi lebih aktif, dan 3. Partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes.

Kelompok pertama (partisipasi pasif) adalah orang-orang yang memiliki minat terhadap politik, karena memandang politik itu sebagai sesuatu yang penting dan sering melakukan diskusi politik dengan kawan-kawannya, namun tidak terlibat atau tidak aktif dalam organisasi sosial. Kelompok yang kedua (partisipasi aktif) ialah orang-orang yang aktif dalam organisasi sosial. Kelompok yang ketiga (partisipasi dalam kegiatan protes), ialah orang-orang yang ikut dalam demonstrasi, menandatangani petisi, atau melakukan boikot.

Anwar Arifin (2011:83) kemudian menambahkan bahwa dalam kelompok itu termasuk orang-orang yang menamakan dirinya golput (golongan putih) yang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Hal itu dilakukan oleh golput terutama sebagai bentuk protes kepada rezim yang berkuasa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Model Partisipasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menurut Rosnia Gosango (2010:3).

a. Faktor Sosial Ekonomi

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik, yaitu :

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ikut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di desa. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tajam pula seseorang dalam menganalisa informasi tentang politik dan persoalan-persoalan sosial yang diterima semakin meningkat dan menciptakan minat dan kemampuannya dalam berpolitik. Karena itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

2. Pengaruh Keluarga

Keluarga merupakan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat di desa. Pemimpin keluarga yaitu ayah adalah orang yang mempengaruhi dalam keluarga tersebut, memilih atau tidak ikut memilih akan memberikan pengaruh terhadap anggota keluarga lainnya.

3. Pekerjaan

Pekerjaan-pekerjaan tertentu sangat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik. Para pemilih yang bekerja di luar lembaga-lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah tidak terlalu memikirkan kehadiran

mereka dalam pemilihan umum, berbeda dengan pemilih yang bekerja di lembaga yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah, pemilih tersebut cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya pada saat pemilu. Biasanya para pegawai negeri tingkat kehadiran mereka lebih tinggi dikarenakan mereka sering langsung berhubungan dengan kebijakan pemerintah.

b. Tingkat Pengetahuan Politik

Faktor politik adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat atau yang disebut juga partisipasi politik. Prilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan, karena menyangkut kehidupan masyarakat.

Adapun faktor-faktor politik meliputi :

1. Pengetahuan masyarakat dapat menentukan keputusan yang akan diambil dalam proses partisipasi politik. Pengetahuan masyarakat dapat menentukan keputusan yang akan diambil dalam proses partisipasi politik, sebagai contoh pada saat pemilihan kepala desa bahwa banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya padahal jika difikirkan bahwa pemilihan kepala desa itu merupakan pemilihan yang secara langsung untuk bekerja di hadapan mereka atau masyarakat sendiri yang akan merasakan secara langsung bagaimana proses penyelenggaraan pemerintah di

desanya, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang kurang peduli dengan dunia politik, hal ini dapat dilihat dari bagian sub indikator sebelumnya yang sudah membahas pendidikan merupakan hal yang sangat mempengaruhi kurang optimalnya partisipasi politik di desa ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat Desa Rananyang di bawah rata-rata.

2. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyatnya. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyatnya sebagai interaksi yang dapat mempengaruhi kelakuan manusia dalam suatu keadaan yang bersifat politik. Suatu pemerintahan penting kiranya untuk berinteraksi dengan rakyatnya, sebab dengan adanya komunikasi yang jelas maka rakyat juga akan mengetahui tentang apa yang akan dilakukan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah maupun pada saat adanya pesta demokrasi, dimana masyarakat juga akan memberikan suaranya pada saat pemilihan umum berlangsung, sehingga jalannya pemilu juga akan lancar dengan adanya partisipasi masyarakat yang kurang.
3. Faktor kepercayaan politik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik, artinya tingginya tingkat

partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki keabsahan (legitimasi) yang tinggi, sehingga bisa dimaknai adanya peraturan-peraturan yang mensyaratkan adanya quorum suara berhubungan dengan sah tidaknya seseorang untuk menjadi pemimpin bertitik tolak dari hal tersebut. Pemberian suara pada Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya memilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak.

4. Faktor Modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa/media komunikasi secara lebih luas/. Kemajuan itu berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang, dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.

C. Penghambat dan Pendorong Partisipasi

Menurut Rosnia Gosango dalam Ade Wardidin (2017) hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada.

a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan pekerjaan dan penghasilan (slamet, 1994:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

b. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam suryawan 2004:29), menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat yang bersangkutan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan.

Hambatan ini dapat merupakan faktor yang mendasar karena dengan kemiskinan seseorang akan berpikir lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau kelompoknya;

2. Pola masyarakat yang heterogen.

Hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada;

- c. Faktor Pendorong

Adapun faktor pendorong partisipasi masyarakat yaitu:

1. Pendidikan politik

Menurut Ramdlon Naning dalam Ade Wardidin, pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara.

D. Pemilihan Gubernur

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan

kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi
- Bupati dan wakil Bupati untuk Kabupaten
- Wali kota dan wakil Wali kota untuk Kota

a. Asas dan Sifat Pemilihan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang disusun oleh Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu mengutip kembali asas pemilu yang terdapat pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil (Pasal 2). Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, asas luber sebetulnya berlaku pada saat pemungutan suara, sedangkan asas jurdil berlaku pada kegiatan penghitungan suara. Agar tidak menimbulkan pengertian bermacam-macam, maka setiap asas harus dijabarkan dan ditegaskan dalam bagian penjelasan undang-undang.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 pemilu dilaksanakan setiap lima tahun. Artinya, pemilu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gubernur dan Wakil Gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten/Kota, dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam hal ini, konstitusi hanya mengatur periode pemilu, tetapi tidak mengatur jadwal masing-masing pemilu.

b. Pemilihan

Tahap selanjutnya dari tata cara pemilihan gubernur menurut peraturan perundang-undangan adalah tahap pelaksanaan. Adapun tahap pelaksanaan ini terdiri dari beberapa kegiatan. Berikut ini penjelasan dari tahap pelaksanaan:

- Penetapan Daftar Pemilih (DPS dan DPT): pada tahap ini KPU Provinsi mendata seluruh pemilih aktif yang ada di provinsi dan memverifikasinya untuk menjadi DPS. Kemudian DPS diumumkan untuk diverifikasi oleh warga dan KPU, lalu ditetapkan sebagai DPT.
- Pengumuman Pendaftaran: KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran calon gubernur beserta dengan persyaratan pendaftarannya.
- Penetapan Pasangan Calon: bakal calon yang telah melakukan pendaftaran diperiksa apakah memenuhi persyaratan pendaftaran atau tidak kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon.
- Kampanye: tahap ini dilakukan sebagai upaya dari setiap pasangan calon untuk menarik sebanyak mungkin pemilik suara agar memilih mereka.
- Masa Tenang: setelah kampanye, pemilih diberi kesempatan untuk memikirkan dengan baik calon yang akan dipilihnya tanpa ada pengaruh dari kampanye pada masa tenang. Jika ada pasangan calon yang masih melakukan kampanye pada masa ini, maka hal tersebut akan dianggap sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

- Pemungutan dan Penghitungan Suara: tahap ini merupakan tahap inti dari pemilu. Setiap pemilih diundang untuk hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara) terdekat dan memberikan suaranya untuk pasangan calon yang sesuai dengan pilihannya.
- Sidang Perkara Pemilu: selama fase pilkada, ada kemungkinan terdapat pelanggaran peraturan dari pemilihan umum. Maka dari itu, dibutuhkan adanya sidang untuk mengadili perkara tersebut. Sebelum persidangan, tentu diadakan pelaporan atas perkara tersebut. Terdapat kemungkinan perubahan pemenang di dalam pemilihan gubernur

c. Pasca pemilihan

- Pertama surat suara dihitung di TPS oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) setelah selesai pemungutan suara. Kemudian dikirim ke kelurahan.
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS itu akan direkap di kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama dua hari.
- Jika rekapitulasi di kelurahan selesai, maka akan diserahkan ke kecamatan untuk direkap oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selesai rekapitulasi di kecamatan, maka terakhir akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi.
- Semuanya dilakukan secara berjenjang dan disediakan waktu dalam tahapan itu masing-masing dua hari.

- Nanti pada tanggal yang telah ditetapkan baru akan mengumumkan secara resmi peroleh suara terbanyak dari semua pasangan calon.

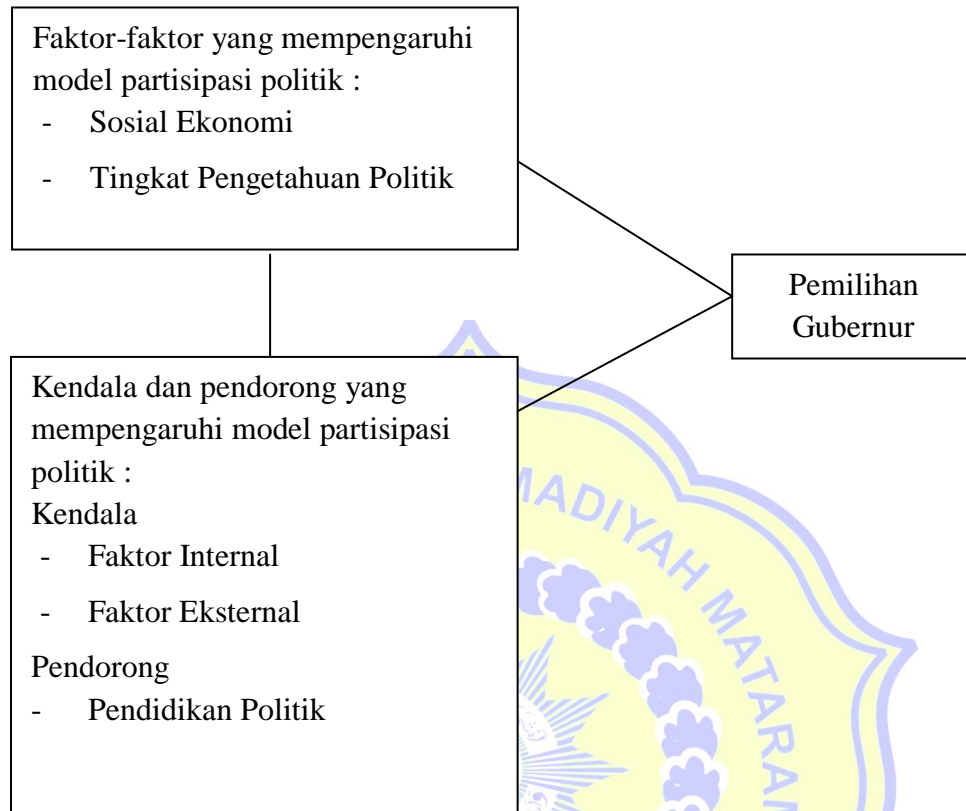
E. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan kendala yang berpengaruh pada partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur.

Untuk mengetahui arah dan cakupan penelitian ini maka ke dua permasalahan tersebut harus dijelaskan dalam sebuah kerangka yang saling berkaitan.



Gambar 2.1



Gambar diatas menjelaskan bahwa ada dua variabel yang akan digunakan dalam menentukan pola serta arah partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur .

Pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yang meliputi; sosial dan ekonomi seperti, a) tingkat pendidikan yaitu Tingkat pendidikan ikut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di desa. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tajam pula seseorang dalam menganalisa informasi tentang politik dan persoalan-persoalan social, b) pengaruh keluarga yaitu keluarga merupakan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan

masyarakat di pemimpin keluarga yaitu ayah adalah orang yang mempengaruhi dalam keluarga tersebut, memilih atau tidak ikut memilih akan memberikan pengaruh terhadap anggota keluarga lainnya, c) pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan tertentu sangat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik, para pemilih yang bekerja di luar lembaga-lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah tidak terlalu memikirkan kehadiran mereka dalam pemilihan umum.

Kedua, kendala-kendala yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu; (1) kemiskinan ialah hambatan ini dapat merupakan faktor yang mendasar karena dengan kemiskinan seseorang akan berpikir lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau kelompoknya, 2) pendidikan ialah tingkat pendidikan ikut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di desa. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tajam pula seseorang dalam menganalisa informasi tentang politik, 3) pekerjaan/profesi ialah pekerjaan-pekerjaan tertentu sangat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik. Para pemilih yang bekerja di luar lembaga-lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah, 4) budaya atau agama ialah masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

F. Definisi Konseptual

1. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan lain sebagainya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. *Pertama*, yaitu faktor sosial ekonomi yang meliputi: tingkat pendidikan, pengaruh keluarga. *Kedua*, tingkat pengetahuan politik yaitu, pengetahuan masyarakat, komunikasi politik antara pemerintah dan rakyatnya dan faktor kepercayaan politik.
3. Faktor-faktor dan kendala yang mempengaruhi partisipasi politik terdiri dari faktor internal, yaitu : faktor sosial ekonomi dan faktor politik. Sedangkan faktor eksternal yaitu kemiskinan dan pola masyarakat yang heterogen.

G. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang dua variabel yang dapat menentukan pola atau bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur maka peneliti menyederhanakannya dalam definisi operasional sebagai berikut :

Tabel 2.2
Operasional Penelitian

No.	Instrumen	Aspek	Indikator
1	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik	a. Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan • Pengaruh Keluarga
		b. Tingkat Pengetahuan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyatnya
2.	Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi partisipasi	a. Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Pekerjaan
		b. Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Pola masyarakat yang heterogen
		c. Faktor Pendorong	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan politik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu, misalnya, berapakah tingkat pengangguran di suatu daerah? Bagaimana komposisi etnis masyarakat di suatu kota? Jika dilakukan dengan baik dan terukur (empiris), penelitian deskriptif akan mampu menghilangkan spekulasi dan penilaian yang muncul hanya karena kesan semata-mata.

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ranan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa. Alasannya adalah karena masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur. Alasan lainnya, lokasi tersebut sebagai

tempat tinggal peneliti sehingga membantu peneliti dalam efisiensi pembiayaan, tenaga, waktu serta kemudahan dalam pengumpulan data.

C. Jenis Data

1. Jenis Data

- Data Primer

Tabel 3.1
Data Primer

No	Nama Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data
1	Tingkat Pendidikan	Kepala Desa	Wawancara mendalam
2	Pengaruh Keluarga	Tokoh Agama/masyarakat	Wawancara mendalam
3	Pekerjaan/Profesi	Kepala Desa/masyarakat	Wawancara mendalam
4	Kepercayaan Politik	Panwascam/Kepala Desa/ masyarakat	Wawancara mendalam
5	Kemiskinan	Warga Miskin	Wawancara mendalam
6	Pengetahuan masyarakat	Panwascam	Wawancara mendalam

Data primer adalah data yang diperoleh langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan. adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi mengenai partisipasi politik masyarakat serta wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Tabel 3.2
Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data
1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Panwascam	Dokumentasi
2	Nama Calon	Panwascam	Dokumentasi
3	Data Tingkat Pendidikan	Kantor Desa	Dokumentasi
4	Data Kemiskinan	Kantor Desa	Dokumentasi
5	Hasil Perhitungan	Panwascam	Dokumentasi

Data sekunder merupakan data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengelolaan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil observasi tentang laporan tertulis seperti gambaran objek penelitian dan sebagainya.
- 2) Hasil catatan, peraturan, pelaksanaan Pilkades.
- 3) Hasil dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-lain tentang cara pemilihan Kepala Desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya tentang masing-masing penggunaan metode pengumpulan data tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Arikunto (2013:199) bahwa observasi adalah teknik yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, yang memungkinkan melihat dan mengamati sendiri secara langsung, kemudian mencatat perilaku atau kejadian dan kondisi fisik sebagaimana yang terjadi dalam keadaan sebenarnya. Selanjutnya, Sugiyono (2012) bahwa observasi adalah cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu secara langsung.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah penelitian wawancara langsung. Dengan informasi-informasi yang ada, peneliti akan memaksimalkan agar mendapat informasi pengelolaan tata ruang dalam mengetahui fungsi dan peran desa sedapat mungkin atau informasi yang ada dan sangat original. Kegiatan wawancara peneliti dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012).

E. Teknik Penentuan Narasumber

Cara menentukan narasumber dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, teknik pemilihan informan yang sesuai dengan keinginan peneliti karena sudah tahu tentang bagaimana letak tempat ataupun lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif ada dua macam informan yaitu informan kunci dan informan biasa. Dimana informasi ialah orang yang dapat memberikan gambaran, pemahaman tentang objek penelitian (Sugiyono, 2012:218).

Adapun informan yaitu informan kunci dan informan biasa.

1. Informan kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Pemerintah Setempat (Camat, Kepala Desa, bawahannya, Kepala Dusun, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat).

2. Informan biasa adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan biasa adalah masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisislah data tersebut dapat berarti dan bermakna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2012). Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan survey yang merupakan proses penggambaran lokasi penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menyatakan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kesimpulan informan tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan atau dilaksanakan.

